

Implementasi Program Gerakang Literasi Sekolah (GLS) Di SMP Negeri 26 Kota Serang

Talitha Tasya Nabila¹, Rina Yulianti²

^{1,2}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Corresponding author email: talithatsyaa@gmail.com

Article info

Article history:

Received : 09 Januari 2026

Accepted : 25 Juni 2026

Published : 30 Juni 2026

Keywords:

Gerakan Literasi
Sekolah; Implementasi
Kebijakan

Abstrak

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan program yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan budaya dan indeks literasi yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik dan berkarakter positif. GLS pada dasarnya sudah digencarkan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir di seluruh Indonesia. Salah satu sekolah yang sudah menerapkan program GLS yaitu SMP Negeri 26 Kota Serang. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berapa permasalahan, seperti rendahnya minat membaca di kalangan peserta didik, sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, serta kurangnya SDM pendukung program GLS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program GLS di SMP Negeri 26 Kota Serang, menggunakan teori pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Charles O. Jones dalam Agustino (2020), yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu organisasi, Interpretasi dan Penerapan. Berdasarkan hasil kajian Implementasi Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMP Negeri 26 Kota Serang, diketahui pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik, walaupun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan dalam sumber daya dan fasilitas, kurangnya pemahaman kelompok pendukung dan kelompok sasaran terhadap program GLS, kurangnya peran orang tua dalam pelaksanaan program dan adanya perbedaan karakter dan rasa malas yang dialami oleh siswa. Maka dari itu, diperlukannya upaya penguatan pelaksanaan program GLS melalui peningkatan sarana dan prasarana, optimalisasi peran seluruh pihak yang terkait, serta pendampingan yang berkelanjutan agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

DOI:

Abstract

The School Literacy Movement (GLS) is a government-issued program designed to improve literacy culture and indices, aiming to foster good habits and positive character. GLS has been actively promoted by the government throughout Indonesia over the past few years. One school that has implemented the GLS program is SMP Negeri 26 Kota Serang. However, several problems have been encountered in its implementation, such as low reading interest among students, inadequate supporting facilities and infrastructure, and a lack of human resources to support the GLS program. This study aims to determine how the GLS program is implemented at SMP Negeri 26 Kota Serang, using the public policy

implementation approach theory proposed by Charles O. Jones in Agustino (2020), which consists of three dimensions: organization, interpretation, and implementation. Based on the results of the study on the Implementation of the School Literacy Movement (GLS) Program at SMP Negeri 26 Kota Serang, it is known that its implementation has been running quite well, although not yet optimal. This is due to several factors, such as limited resources and facilities, a lack of understanding of the GLS program among support groups and target groups, a lack of parental involvement in program implementation, and differences in character and laziness among students. Therefore, efforts are needed to strengthen the implementation of the GLS program by improving facilities and infrastructure, optimizing the roles of all related parties, and providing ongoing support to ensure the program's objectives are achieved optimally.

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peran sentral dalam membangun serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila kualitas pendidikan dan tujuan memiliki dampak yang baik serta mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang handal (Safri et al, 2022). Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdapat berbagai macam upaya yang dapat dilakukan, salah satunya adalah meningkatkan kemampuan literasi (Nasrullah & Asmarini, 2024).

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup abad ke-21 melalui pendidikan yang terintegrasi, mulai dari keluarga, sekolah, sampai dengan masyarakat, sesuai dengan amanah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab III, Pasal 4 Ayat 5 menyatakan bahwa “Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat” sebagai upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter dalam menghadapi era globalisasi.

Di Indonesia sendiri tingkat literasi masih menjadi tantangan dalam penerapannya, khususnya pada masyarakat usia muda. Berdasarkan data yang dikutip dari hasil kajian kegemaran membaca masyarakat Indonesia, diketahui tingkat kegemaran membaca kelompok masyarakat usia muda selalu menempati

posisi terbawah. Adapun data tingkat kegemaran membaca berdasarkan kelompok usia bisa dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.
Skor Tingkat Gemar Membaca (TGM)
berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2022-2024

No	Usia	Tingkat Gemar Membaca		
		2022	2023	2024
1	10 – 24 tahun	60,85	65,00	67,52
2	25 – 39 tahun	65,17	66,18	74,39
3	40 – 54 tahun	66,79	69,24	76,06
4	55 – 69 tahun	67,23	69,90	76,22

Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa jika TGM berdasarkan kelompok usia masyarakat diurutkan dari skor tertinggi, maka TGM kelompok usia muda menduduki posisi terakhir selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2022 TGM kelompok usia muda menduduki skor terendah dibandingkan dengan kelompok usia lainnya yang hanya mencapai 60,85. Selain itu, pada tahun 2023 dan 2024 TGM kelompok usia muda kembali menduduki skor terendah yaitu 65,00 dan 67,52. Meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun angka ini masih tergolong sedang dan belum mencapai tingkat literasi yang optimal, mengingat kelompok usia muda menjadi satu-satunya kelompok dengan skor TGM yang tidak mencapai skor diatas 70.

Rendahnya minat literasi pada remaja juga didukung dengan hasil survey *Programme for International Student Assessment (PISA)* yang diselenggarakan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* setiap 3 tahun sekali. Pada tahun 2022, Indonesia berada dalam peringkat 69 atau posisi ke-12 terbawah dari 81 negara. Berdasarkan survei tersebut diketahui bahwa 75 persen siswa belum memahami terkait bacaan dengan skor pada bidang literasi sebesar 359 dengan rata-rata global sebesar 476. Hasil tes PISA 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi siswa di Indonesia masih jauh dari rata-rata pendidikan global.

Dalam meningkatkan budaya dan indeks literasi yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik dan membentuk generasi berkarakter positif, pemerintah mengeluarkan Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Program ini tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Penumbuhan Budi Pekerti yang selanjutnya disingkat PBP adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang harus dilakukan oleh siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, sampai dengan kelulusan sekolah.

GLS pada dasarnya sudah senantiasa digencarkan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir di seluruh Indonesia. Melalui program tersebut, literasi dijadikan sebagai aktivitas penting sebagai bentuk menumbuhkan pekerti, serta sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan minat literasi di masyarakat, khususnya para pelajar. Salah satu daerah yang sudah menjalankan program GLS adalah Provinsi Banten. Namun, dalam pengembangan kegiatan literasi, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas penerapannya. Jika dilihat dari data skor TGM berdasarkan provinsi pada tahun 2024, diketahui bahwa Provinsi Banten merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang tidak masuk ke dalam 10 urutan teratas skor TGM dengan skor 70,66. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki tingkat kegemaran membaca yang cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa.

Rendahnya TGM Provinsi Banten juga berpengaruh pada hasil capaian kemampuan literasi siswa di Provinsi Banten. Berdasarkan data rapor pendidikan Provinsi Banten tahun 2024, diketahui bahwa kemampuan literasi murid di provinsi Banten masuk kedalam kategori “Sedang”, khususnya pada jenjang SD dan SMP yang artinya murid yang sudah mencapai kompetensi minimum literasi tidak sampai 70 persen. Sejalan dengan hal tersebut, kurangnya minat membaca pada tingkat SMP juga didukung oleh hasil rapor pendidikan Kota Serang tahun 2024 yang menyebutkan bahwa literasi tingkat SMP di Kota Serang masuk dalam peringkat menengah bawah pada tingkatan Provinsi dan berada pada kategori “Sedang” dengan skor sebesar 63 persen.

Berdasarkan data kementrian pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen), diketahui bahwa Kota Serang memiliki tiga puluh SMP Negeri untuk menunjang kebutuhan pendidikan dasar dalam membangun fondasi akademis, yang salah satunya yaitu kemampuan literasi melalui program GLS agar bisa menjadi generasi yang berkualitas dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa.

Salah satu sekolah yang sudah menjalankan program GLS di Kota Serang yaitu SMP Negeri 26 Kota Serang yang berlokasi di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Meski begitu, Pada tahun 2024, diketahui bahwa SMP Negeri 26 Kota Serang merupakan salah satu sekolah yang memiliki capaian dengan kategori “Kurang” pada tingkat literasi membaca di Kota Serang.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukannya permasalahan yang terjadi terkait dengan literasi di SMP Negeri 26 Kota Serang, diantaranya rendahnya minat membaca di kalangan peserta didik. Hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa siswa yang belum memiliki kemampuan membaca yang memadai. Selain itu, pada pelaksanaan GLS di SMPN 26 Kota Serang masih ditemukannya permasalahan terkait sarana dan prasarana seperti penempatan buku yang tidak beraturan, minimnya area yang ramah literasi, dan penempatan pojok baca yang dirasa kurang efisien karena minimnya ketersediaan buku penunjang program GLS seperti buku fiksi dan non fiksi. Tak hanya itu saja, SMP Negeri 26 Kota Serang juga belum didukung adanya tenaga pustakawan yang ahli di bidangnya, sehingga berdampak pada penyelenggaraan perpustakaan yang belum optimal, karena hingga saat ini perpustakaan sekolah belum dilengkapi dengan pelayanan dan manajemen perpustakaan yang memadai.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait Implementasi Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMP Negeri 26 Kota Serang. Adapun penelitian ini berfokus pada Implementasi program GLS dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Charles O. Jones (dalam Agustino, 2020:169) yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu Organisasi, Interpretasi dan Penerapan.

KAJIAN TEORI

Kajian teori merupakan bagian dari proses penelitian yang berfokus pada pengkajian berbagai sumber pustaka yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang dipilih oleh peneliti. Pada tahap ini, peneliti mengkaji teori yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep-konsep yang mendukung penelitian. Kajian teori berperan sebagai dasar pemikiran

yang digunakan peneliti dalam menyusun kerangka konseptual dan arah penelitian.

Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pedoman dan batasan dalam perencanaan maupun pelaksanaan berbagai kegiatan di masyarakat. Menurut Tachjan (2006:15), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang memiliki tanggung jawab moral karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas serta keterikatan terhadap negara atau lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan. Oleh sebab itu, nilai-nilai tersebut seharusnya tercermin dalam sikap aparat sebagai pelaksana kebijakan, sekaligus terbangun melalui hubungan dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, menurut Thomas Dye (dalam Anggara, 2014:35), kebijakan publik dimaknai sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Setiap pilihan tersebut tentu memiliki tujuan tertentu. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap bijaksana dalam menetapkan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh agar kebijakan yang dihasilkan memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat. Namun, pada dasarnya kebijakan publik merupakan pedoman sekaligus batasan yang ditetapkan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat melalui berbagai keputusan yang sarat dengan tanggung jawab moral. Kebijakan tersebut tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak, yang keduanya memiliki tujuan dan dampak tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kebijaksanaan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakannya, serta tercermin dari sikap aparat dan terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat demi tercapainya manfaat yang optimal.

Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan menjadi tahap krusial dalam rangkaian kebijakan karena pada tahap inilah masyarakat dapat melihat apakah suatu persoalan publik benar-benar ditangani atau tidak. Proses pelaksanaannya tidaklah sederhana, melainkan melibatkan berbagai tahapan yang saling berkaitan dan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan, sehingga tidak jarang mengandung unsur politis pada praktiknya. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 2021:87) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan berbagai upaya atau langkah yang dilakukan oleh individu, pejabat, maupun kelompok, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Untuk melihat hasil pencapaian dari sebuah kebijakan yang telah dibuat, maka perlu adanya suatu proses pengukuran. Pengukuran dari hasil sebuah kebijakan dapat diketahui dari berbagai model implementasi yang dikemukakan oleh para ahli. Pada penelitian ini, model implementasi yang digunakan yaitu model implementasi menurut Charles O. Jones (dalam Agustino, 2020:169). Hal ini dikarenakan, model implementasi kebijakan dari Charles O. Jones dapat menjelaskan dimensi-dimensi sesuai dengan topik penelitian.

Menurut Jones (dalam Agustino, 2020:169) dalam menjalankan kegiatan implementasi program atau pelaksanaan kebijakan terdapat tiga jenis kegiatan yang perlu diperhatikan secara saksama, yaitu:

- a. Organisasi : menata atau menyesuaikan kembali sumber daya, unit dan metode agar kebijakan atau program dapat terlaksana dan memberikan dampak yang diharapkan
- b. Interpretasi : menerjemahkan kebijakan ke dalam Bahasa yang lebih mudah dipahami, diterima dan dilaksanakan oleh para pelaksana di lapangan.
- c. Penerapan : menjalankan kegiatan secara konsisten sesuai dengan tujuan serta ketentuan yang sudah ditetapkan dalam suatu program atau kebijakan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi program GLS di SMP 26 Kota Serang lebih mendalam berdasarkan teori implementasi kebijakan publik menurut Charles O. Jones (dalam Agustino, 2020:169) yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu Organisasi, Interpretasi dan Penerapan. Adapun sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui observasi dengan mengamati secara langsung pada objek penelitian, wawancara dengan menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian, data sekunder diperoleh dari data-data yang berhubungan dengan GLS yang sudah tersedia di objek penelitian. Lalu, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu: kondensasi data, penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang digunakan untuk melihat dan memahami bagaimana implementasi Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMP Negeri 26 Kota Serang, yaitu teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones (dalam Agustino, 2020:169) yang mencakup tiga dimensi, yakni organisasi, interpretasi, dan penerapan.

1. Organisasi

Sumber daya merupakan segala hal yang dibutuhkan agar suatu program bisa dijalankan secara efektif dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), diketahui SMP Negeri 26 Kota Serang sudah cukup memiliki SDM yang berkompeten di bidangnya dan didukung dengan pelatihan yang memadai untuk menjadi SDM yang efektif dalam melaksanakan program. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan rutin pelatihan serta pembekalan yang diberikan kepada para guru dan staff terkait dengan literasi.



Gambar 1 : Kegiatan Komunitas Belajar dan Diskusi Bersama
(Sumber: SMP Negeri 26 Kota Serang)

Gambar di atas menunjukkan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh pihak sekolah dalam bentuk komunitas belajar internal. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membantu guru memperbarui dan meningkatkan keterampilan mereka secara berkala. Walaupun para guru sudah cukup kompeten dan berperan sebagai teladan literasi bagi siswa dalam menjalankan program yang ada. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala yang ditemukan, yakni belum tersedianya tenaga pustakawan yang memiliki keahlian profesional untuk mendukung jalannya program GLS, karena sampai saat ini perpustakaan di SMP Negeri 26 Kota Serang masih dikelola oleh satu orang yang merangkap beberapa tugas. Hal ini membuat manajemen dan layanan perpustakaan belum terselenggara dengan optimal

Terkait dengan aspek sumber daya finansial, diketahui bahwa penyelenggaraan program GLS didukung oleh dana BOS dan dana lain seperti dana OSIS untuk menunjang pelaksanaan program. Berdasarkan informasi yang didapatkan, sejauh ini anggaran tersebut dirasa masih mencukupi untuk mendukung penyelenggaraan GLS di SMP Negara 26 Kota Serang. Hal ini disebabkan karena tidak semua kegiatan memerlukan penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaannya bisa memanfaatkan sumber daya penunjang yang sudah tersedia di lingkungan sekolah.

Selain itu, sekolah juga telah memiliki sarana dan prasarana pendukung literasi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan GLS, seperti perpustakaan dan

pojok baca. Meskipun demikian, jumlah dan variasi bahan bacaan fiksi dan non-fiksi yang tersedia untuk menunjang program GLS masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan organisasi terhadap pelaksanaan GLS sudah ada, namun masih memerlukan penguatan agar program dapat berjalan lebih optimal.

Keberlangsungan pelaksanaan GLS di SMP Negeri 26 Kota Serang, memiliki struktur organisasi pelaksana yang jelas dan tertulis, yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, kepala perpustakaan, tim literasi sebagai penggerak program dan seluruh guru yang berperan dalam melaksanakan program. Adanya struktur organisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program GLS berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Pelaksanaan GLS ini juga didukung adanya kolaborasi dari berbagai pihak, diantaranya pihak Dinas Pendidikan Kota Serang, Perpustakaan Daerah Kota dan Provinsi, beserta seluruh warga sekolah sehingga kegiatan literasi dapat berjalan secara konsisten. Temuan ini sejalan dengan pandangan Charles O. Jones yang menekankan bahwa kesiapan organisasi, kecukupan sumber daya, serta koordinasi antar pelaksana merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Interpretasi

Interpretasi berkaitan dengan pemahaman pelaksana terhadap suatu kebijakan agar dapat dipahami dan dilaksanakan. Dalam hal ini, pemahaman stakeholder internal dalam pelaksanaan program GLS di SMP Negeri 26 Kota Serang, yang terdiri dari Dinas Pendidikan Kota Serang, Pengawas Sekolah SMP Negeri 26 Kota Serang, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Kota Serang beserta jajarannya, umumnya telah memahami program GLS dengan cukup baik.

Meski demikian, terdapat pemahaman yang berbeda pada stakeholder eksternal dan kelompok sasaran, khususnya orang tua siswa dan sebagian siswa yang tergolong masih terbatas terkait dengan pemahaman program GLS. Dalam hal ini, sebagian besar orang tua siswa mengaku belum mengenal istilah

GLS atau Gerakan Literasi Sekolah, meskipun mereka mengetahui adanya kegiatan membaca yang dilakukan di sekolah. Namun, sebagian dari mereka menganggap bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembelajaran pada umumnya, bukan bagian dari suatu program yang memiliki tujuan. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan interpretasi antara pelaksana program dan kelompok sasaran.

Selain itu, terkait dengan sosialisasi program kepada stakeholder pendukung dan kelompok sasaran diketahui belum dilakukan secara efektif dan merata oleh pihak SMP Negeri 26 Kota Serang, sebagian besar orang tua dan siswa menyatakan belum pernah menerima sosialisasi secara jelas dan hanya mengetahui literasi sebagai kegiatan membaca dan bagian dari belajar pada umumnya saja. Sementara itu, pihak sekolah SMP Negeri 26 Kota Serang menyampaikan bahwa sosialisasi sudah dilakukan dan umumnya dilaksanakan pada momen tertentu seperti ketika awal tahun ajaran baru dan saat pembagian rapor dengan menyisipkan informasi terkait program GLS. Adanya Perbedaan pemahaman ini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi masih terbatas, sehingga keterlibatan orang tua dan siswa sebagai stakeholder penting belum sepenuhnya terwujud.

3. Penerapan

Penerapan program merupakan tahap penting dalam proses implementasi kebijakan, karena tahap ini menentukan bagaimana suatu kebijakan berjalan di lapangan. Dalam hal ini, SMP Negeri 26 Kota Serang sudah menjalankan program GLS secara rutin dan terjadwal, yaitu setiap satu minggu sekali dan dilakukan setiap hari Selasa. Kegiatan ini sudah dimasukkan ke dalam program kokurikuler sehingga pelaksanaannya bersifat wajib dan berkelanjutan.

Bentuk kegiatan literasi yang diselenggarakan di SMP Negeri 26 Kota Serang pun cukup beragam, baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Kegiatan yang paling umum dilakukan meliputi membaca buku non-pelajaran, menulis ringkasan atau refleksi dari bacaan, menceritakan kembali isi bacaan secara lisan, serta permainan edukatif yang berkaitan dengan literasi.



Gambar 2 : Kegiatan Permainan Edukatif Lisan di dalam kelas
(Sumber: SMP Negeri 26 Kota Serang)



Gambar 3 : Kegiatan Pelaksanaan GLS di di luar kelas
(Sumber: SMP Negeri 26 Kota Serang)

Gambar diatas merupakan variasi kegiatan literasi di SMP Negeri 26 Kota Serang. Dalam hal ini, tim literasi sebagai penggerak utama kegiatan membuat kegiatan literasi tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas membaca saja, tetapi juga keterampilan menulis, berbicara dan berpikir kritis. Pendekatan yang variatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa agar kegiatan literasi tidak terasa monoton dan membosankan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah berkomitmen dalam menjalankan program GLS menjadi program yang berkelanjutan.

Tak hanya itu saja, komunikasi antar stakeholder di lingkungan sekolah dan dinas pendidikan dinilai telah berjalan cukup baik, namun koordinasi tersebut masih lebih banyak berfokus pada pihak internal sekolah. Alur komunikasi yang terbangun belum sepenuhnya melibatkan orang tua sebagai bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program GLS. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran orang tua dalam pelaksanaan kegiatan literasi masih

belum terintegrasi secara optimal dengan program yang dijalankan oleh sekolah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa keterlibatan orang tua dalam mendukung kegiatan literasi di luar lingkungan sekolah masih tergolong rendah. Sehingga berdampak pada rendahnya kebiasaan literasi siswa di luar sekolah. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan sebagian besar siswa yang menyatakan bahwa mereka jarang membaca di rumah dan biasanya hanya membaca ketika ada tugas atau menjelang ujian sekolah saja.

Meski begitu, sebagian besar implementor menunjukkan respon positif terhadap pelaksanaan program GLS. Para informan menilai program GLS bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Hal senada juga diungkapkan oleh stakeholder eksternal yang menunjukkan sikap mendukung terhadap program ini, karena program ini dianggap membantu perkembangan siswa. Meski begitu, keterlibatan orang tua dalam mendampingi kegiatan literasi di rumah masih belum merata. lantaran beberapa orang tua siswa cenderung pasif karena keterbatasan waktu, pekerjaan dan kondisi lingkungan.

Lalu, jika dilihat dari tingkat kepatuhan, pelaksanaan program GLS di sekolah umumnya sudah berjalan sesuai dengan arahan dan panduan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, para guru mengikuti instruksi dari koordinator tim literasi dan melaksanakan kegiatan literasi secara. Sementara, terkait dengan tingkat kepatuhan siswa, hampir sebagian besar mematuhi kegiatan GLS, meskipun nyatanya masih terdapat beberapa siswa yang kurang disiplin, seperti tidak fokus atau bercanda saat melaksanakan kegiatan literasi. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan karakter dan rasa malas yang dialami oleh siswa.

Pada dimensi penerapan, aspek dampak program menjadi salah satu aspek penting untuk mengetahui sejauh mana program memberikan manfaat dan perubahan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa sebagian besar informan mengakui bahwa pelaksanaan program GLS telah memberikan berbagai manfaat, terlebih siswa sebagai kelompok sasaran. Adapun dampak

yang terlihat yakni meningkatnya kemampuan literasi siswa, baik dalam memahami bacaan, menambah pengetahuan, ataupun pembiasaan diri terhadap kegiatan literasi. Hal ini juga tercermin dari meningkatnya skor literasi pada hasil rapor pendidikan.

Berdasarkan hasil Rapor Pendidikan SMP Negeri 26 Kota Serang pada tahun 2025, diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai pada indikator kemampuan literasi sebesar 22,22 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tak hanya itu saja, adanya kegiatan literasi ini membuat siswa menjadi lebih aktif, percaya diri dan berani mengemukakan pendapat melalui kegiatan membaca, menulis maupun berdiskusi.



Gambar 4 : Siswa yang Sedang menyampaikan pendapat
(Sumber: SMP Negeri 26 Kota Serang)

Gambar diatas merupakan kegiatan literasi yang dilakukan di lapangan, dan memperlihatkan salah seorang siswa yang sudah berani menyampaikan pendapat di hadapan seluruh peserta didik. Hal ini menjadi penanda bahwa program GLS sudah menunjukkan perkembangan yang positif di kalangan siswa sebagai kelompok sasaran utama. Meskipun sebagian orang tua belum sepenuhnya merasakan dampak secara langsung, namun secara umum program GLS sudah memberikan kontribusi yang baik dalam membangun kebiasaan membaca serta mendukung perkembangan literasi peserta didik secara bertahap.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMPN 26 Kota Serang dinilai telah berjalan cukup baik jika

ditinjau dengan tahapan implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones, yang mencakup aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan. Pada tahap organisasi, sekolah telah memiliki struktur pelaksana dan sumber daya manusia yang mendukung, ditandai dengan keterlibatan seluruh guru serta keberadaan Tim Literasi, meskipun masih terdapat keterbatasan pada pengelolaan perpustakaan dan kelengkapan koleksi buku pengayaan. Pada tahap interpretasi, kebijakan GLS telah dipahami dan diterjemahkan dengan baik oleh pihak sekolah serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. Meski begitu, pemahaman dan partisipasi orang tua belum sepenuhnya merata. Selanjutnya, pada tahap penerapan, kegiatan GLS telah dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan dengan bentuk kegiatan yang beragam serta memberikan dampak positif terhadap sikap dan minat literasi peserta didik, walaupun masih dijumpai kendala terkait dengan keterlibatan orang tua yang belum optimal. Dengan demikian, pelaksanaan program GLS di SMPN 26 Kota Serang secara umum telah berjalan ke arah yang positif, namun masih memerlukan penguatan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih menyeluruh.

REFERENSI

Buku :

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (Third ed.). California: Sage Publications.
- Nasrullah, R., & Asmarini, P. (2024). *Risalah Kebijakan: Meningkatkan Literasi Indonesia Melalui Optimalisasi Peran Buku*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative.

Jurnal :

- Asir, Sulfasyah, & Agustan. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SD Negeri Tombolo Pao. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8, 4141 - 4153.
- Astuti, E. (2022). Gerakan Literasi Sekolah untuk Menumbuhkan Nilai Budi Pekerti Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah, dan Humaniora*, 6 (2), 17-24
- Hidayati, T. N., & Nawangsari, E. R. (2024). Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMPN 4 Sidoarjo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(4), 1366-1379.
- Sariani, N. W. (2020). Implementasi Program GLS di SMP Negeri Kuta Selatan Dalam Upaya Menumbuhkembangkan Minat Membaca Siswa. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 8, Issue 1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Yoga, dkk. (2024). Implementasi Program Gerakan Literasi Sekolah Dalam Menumbuhkan Minat Baca Siswa di SMP Negeri 4 Sambas. 2(10). <https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/262>

Skripsi :

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

Dokumen :

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Desain induk gerakan literasi sekolah.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2017). Materi Pendukung Literasi Baca Tulis.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2023). Laporan Akhir Kajian Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia 2023.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2024). Laporan Akhir Kajian Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia 2024.

Sumber Lainnya :

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tek. (2024). *Rapor Pendidikan Indonesia*. <https://data.kemdikbud.go.id/publikasi/p/rapor-pendidikan-indonesia/rapor-pendidikan-indonesia-2024>, Diakses pada 21 Juli 2024

Prasastisiwi, A. H. (2024). *Posisi Indonesia di PISA 2022, Siapkah untuk 2025*,
https://goodstats.id/article/posisi-indonesia-di-pisa-2022-siapkah-untuk-2025-6RLyK#google_vignette Diakses pada 22 Februari 2025